



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke –
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 6 Maret 2013
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.30 WIB s.d 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 15 Januari 2013; 2. Membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 BPK RI pada Kementerian Perumahan Rakyat.
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, MSi
Hadir Anggota	: dari 56 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan Rakyat pada hari ini adalah melanjutkan Rapat Kerja tanggal 15 Januari 2013 yang lalu.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perumahan Rakyat untuk menyampaikan kembali penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan hal-hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun termasuk menyangkut kelembagaan Kementerian dan Badan-badan.
2. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk mempublikasikan seluruh nama Kepala Keluarga (KK) dan alamat penerima bantuan Program Rumah Swadaya berdasarkan SK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2012, struktur organisasi dan personilnya serta Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di masing-masing Kabupaten/Kota di Website Kementerian Perumahan Rakyat.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyampaikan data realisasi penyaluran dana BSPS dan Bantuan Operasional (BOP) Tahun Anggaran 2012 per masing-masing Kabupaten/Kota.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan semua permasalahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2012 paling lambat akhir Maret 2013, di antaranya :
 - a. menyelesaikan pembayaran (100%) kepada penerima BSPS berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat;
 - b. menyelesaikan pembayaran dana BOP dan gaji TPM.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan Rakyat agar pengusulan program BSPS TA 2013 berbasis Desa Tuntas, dimana verifikasi faktualnya dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat bukan oleh SKPD.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat dalam pembangunan Rumah Susun, terhadap keadaan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan bangunan yang ada (eksisting), dapat dilakukan dengan membuat disain tersendiri, tidak harus berdasarkan tipikal disain yang sudah disiapkan.
6. Komisi V DPR RI memahami dan menyetujui usulan perubahan target terbangunnya 217 TB Rusun pada tahun 2012 dengan rincian kombinasi kontrak sebagai berikut:
 - a. 126 TB *Single Year Contract* (penyelesaian akhir Tahun 2012);
 - b. 91 TB *Multi Years Contract* 2012-2013 dengan rincian:
 - i. Tahun 2012 dengan alokasi 3% (Rp. 18,06 Miliar);
 - ii. Tahun 2013 dengan alokasi 97% (Rp. 584 Miliar).
7. Komisi V DPR RI memahami dan menyetujui usulan perubahan pembangunan Rusun pada tahun 2013 dengan rincian kombinasi kontrak sebagai berikut:
 - a. 115 TB *Single Year Contract* dengan anggaran sebesar Rp. 839,6 Miliar;
 - b. 30 TB *Multi Years Contract* 2013-2014 dengan anggaran Rp. 302,4 Miliar.
8. Komisi V DPR RI dapat memahami dan menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Perumahan Rakyat TA 2013, termasuk membatalkan realokasi anggaran Penataan Ciliwung yang belum mempunyai Keppres (sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja pada tanggal 27 November 2012), melalui perubahan antar Satuan Kerja sebagai berikut :
 - a. Sekretariat menjadi Rp 164 Miliar;
 - b. Deputi Bidang Perumahan Formal menjadi Rp 1.773 Miliar;
 - c. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menjadi Rp 621 Miliar;
 - d. Deputi Bidang Perumahan Swadaya tetap Rp 2.296 Miliar;
 - e. Deputi Bidang Pembiayaan menjadi Rp 16,5 Miliar;
 - f. Pusat Pengembangan Perumahan menjadi Rp 79 Miliar;
 - g. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan tetap Rp 216,9 Miliar.

9. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyampaikan hasil audit pengembang kepada Komisi V DPR RI.
10. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyusun RKA-K/L Rinci paling lambat akhir Maret 2013 sehingga Komisi V DPR RI dapat menindaklanjuti kepada Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan.
11. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan tindak lanjut semua rekomendasi atas 28 (duapuluh delapan) temuan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 6 Maret 2013

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT,

TTD

DJAN FARIDZ

KETUA RAPAT,

TTD

MULYADI